

DLHK Provinsi Banten Dorong Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Bimbingan Teknis Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Kabupaten Lebak.



Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan, penyedia jasa lingkungan, serta pelindung keanekaragaman hayati, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan hutan masih cukup besar, mulai dari praktik penebangan ilegal, perdagangan hasil hutan yang tidak sah, hingga lemahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi kehutanan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan dan instrumen yang mampu menjamin legalitas dan kelestarian pengelolaan hutan. Salah satu instrumen penting yang telah diterapkan secara nasional adalah **Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)**. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh hasil hutan yang diproduksi dan diperdagangkan berasal dari sumber yang legal, dikelola secara lestari, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Provinsi Banten, dengan karakteristik wilayah yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan melibatkan banyak masyarakat dalam aktivitas kehutanan, memiliki peran strategis dalam implementasi SVLK. Kabupaten Lebak, khususnya Kecamatan Gunung Kencana, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi kehutanan sekaligus tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian hutan.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong tata kelola kehutanan yang baik, **Balai Pengolahan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII**, Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan, menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)** di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada **22 Oktober 2025**. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten** sebagai mitra strategis dalam penguatan pengelolaan hutan lestari di daerah.

Penguatan Kapasitas Melalui Bimbingan Teknis SVLK

Bimbingan teknis SVLK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kompetensi para pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha kehutanan, aparat pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar hutan. Peningkatan kapasitas ini dinilai sangat penting agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip legalitas dan kelestarian dalam pengelolaan hasil hutan.

Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pengetahuan terkait konsep dasar SVLK, regulasi yang melandasinya, serta manfaat jangka panjang dari penerapan sistem tersebut. SVLK tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing produk hasil hutan Indonesia di pasar nasional maupun internasional.

DLHK Provinsi Banten memandang bahwa edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha merupakan kunci keberhasilan implementasi SVLK di lapangan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan praktik-praktik pengelolaan hutan yang tidak sesuai aturan dapat diminimalkan, sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kehadiran Anggota DPR RI Perkuat Dukungan Kebijakan

Kegiatan bimbingan teknis ini turut dihadiri oleh **Arif Rahman, S.H., Anggota DPR RI**, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan nyata dari legislatif terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan hutan di daerah.

Dalam sambutannya, Arif Rahman menegaskan bahwa **Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)** merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap hasil hutan yang beredar di pasar memiliki legalitas yang jelas dan berasal dari pengelolaan yang lestari. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan SVLK sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi aktif seluruh pihak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Kegiatan seperti ini penting untuk memastikan bahwa hasil hutan kita tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga terjamin dari sisi legalitas dan kelestariannya. Masyarakat perlu memahami bahwa pengelolaan hutan lestari bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama,” ujar Arif Rahman.

Pernyataan tersebut sejalan dengan semangat DLHK Provinsi Banten dalam mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Materi Teknis dan Implementasi SVLK di Lapangan

Bimbingan teknis ini menghadirkan narasumber kompeten dari **Balai Pengolahan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII**, yang memberikan pemaparan mendalam mengenai aspek teknis SVLK. Materi yang disampaikan mencakup prosedur verifikasi legalitas hasil hutan, penerapan standar pengelolaan hutan lestari, serta mekanisme sertifikasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai manfaat langsung dari penerapan SVLK, antara lain peningkatan kepercayaan pasar, akses terhadap pasar ekspor, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, SVLK juga berperan dalam mencegah peredaran hasil hutan ilegal yang dapat merugikan negara dan merusak lingkungan.

Diskusi interaktif antara narasumber dan peserta menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan ini. Berbagai persoalan dan tantangan di lapangan, seperti keterbatasan pemahaman administrasi, biaya sertifikasi, serta pendampingan teknis, dibahas secara terbuka untuk mencari solusi bersama.

Sinergi Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha

Lebih dari sekadar kegiatan edukatif, bimbingan teknis SVLK ini juga berfungsi sebagai forum komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha kehutanan. Sinergi ini dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

DLHK Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memfasilitasi masyarakat serta pelaku usaha dalam penerapan SVLK. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan pengelolaan hutan di Provinsi Banten dapat semakin tertata dan memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Gunung Kencana dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki potensi kehutanan yang besar sekaligus keterlibatan aktif masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan masyarakat setempat dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari hasil hutan yang dikelola secara legal.

Antusiasme Peserta dan Harapan ke Depan

Kegiatan bimbingan teknis berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta ketertarikan peserta terhadap materi yang disampaikan. Banyak peserta berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di Kabupaten Lebak, tetapi juga di wilayah lain di Provinsi Banten.

Para peserta juga menyampaikan harapan agar pemerintah, khususnya DLHK Provinsi Banten, dapat terus memberikan pendampingan teknis dan kemudahan akses informasi terkait SVLK. Dengan demikian, implementasi SVLK tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar dipahami sebagai upaya bersama dalam menjaga kelestarian hutan.

Penutup

Bimbingan Teknis Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang diselenggarakan di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kehutanan yang legal, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Banten. Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Melalui peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat serta pelaku usaha kehutanan, SVLK diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah praktik ilegal, meningkatkan daya saing produk hasil hutan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPR RI, menunjukkan bahwa pengelolaan hutan lestari merupakan agenda bersama yang memerlukan dukungan lintas sektor.

DLHK Provinsi Banten menegaskan bahwa upaya pelestarian hutan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Bimbingan teknis SVLK ini menjadi salah satu wujud nyata dari kolaborasi tersebut, sekaligus investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan di Banten.

Ke depan, DLHK Provinsi Banten berharap agar implementasi SVLK dapat terus diperluas dan diperkuat, sehingga pengelolaan hutan di daerah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga fungsi ekologis dan sosial hutan. Dengan pengelolaan yang legal dan lestari, hutan Banten diharapkan mampu menjadi penopang pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan, sekaligus warisan berharga bagi generasi mendatang.